

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Lalu Ahmad Yani, S.KM, M.KES

**Jabatan** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Itratip, S.T, M.T

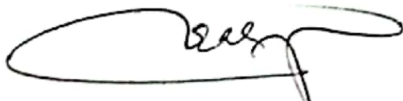
**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**



**Itratip, S.T, M.T**

Mataram, 02 Januari 2023

**Pihak Pertama,**



**Lalu Ahmad Yani, S.KM, M.KES**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu)	100	Persen	-
		2. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen	
		3. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	Persen	
		4. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu yang disesuaikan dengan regulasi	9	Daerah	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	FORMULA
		5. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Daerah	
		6. Persentase Penyelesaian Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100	Persen	
		7. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	100	Persen	

Sasaran Kegiatan :		Anggaran :
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	Rp 93,605,257,000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 26,621,771,000

Pihak Kedua,

Itratip, S.T, M.T

Mataram, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Lalu Ahmad Yani, S.KM, M.KES